

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil serta saran yang relevan berdasarkan hasil temuan penelitian. Secara umum inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meningkatkan akuntabilitas publik melalui pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah telah berjalan dengan baik. Melalui pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* yang terintegrasi, KPK menunjukkan komitmen dalam mendorong transparansi, memperkuat budaya anti-korupsi, serta meningkatkan partisipasi publik dan aparatur sipil negara dalam proses pelaporan gratifikasi secara digital. Lebih lanjut, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Inovasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik di instansi pemerintah. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses bagi para pegawai negeri dan penyelenggaraan negara untuk melaporkan gratifikasi secara cepat, aman, dan transparan. Inovasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi pelaporan, tetapi juga memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap potensi praktik koruptif. Proses pengembangan aplikasi melibatkan sinergi antardirektorat di KPK, khususnya Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Manajemen Informasi, serta dukungan regulasi dan kelembagaan di lingkungan kementerian/lembaga melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. Di sisi

lain, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada instansi pemerintah menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi aplikasi. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pelaporan, tetapi juga turut membangun budaya integritas dan tanggung jawab publik di lingkungan birokrasi pemerintah.

Efektivitas penggunaan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut telah berfungsi secara efektif dalam mendukung upaya pencegahan gratifikasi dan peningkatan akuntabilitas publik. Efektivitas ini tercermin dari beberapa aspek. Pertama, pemahaman program telah terbentuk secara baik di kalangan Aparatur Sipil Negara, didukung oleh sosialisasi yang intensif dan beragam metode edukasi, sehingga pegawai memahami tujuan serta mekanisme pelaporan dengan jelas. Kedua, aplikasi telah tepat sasaran karena menjangkau unit-unit kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap gratifikasi, walaupun masih terdapat tantangan pada kesadaran pelaporan individu dan budaya organisasi. Ketiga, ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan telah tercapai dengan dukungan teknologi yang memungkinkan pelaporan dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta adanya notifikasi dan kecepatan respons dari pihak KPK. Keempat, aplikasi ini telah membantu pencapaian tujuan organisasi, terlihat dari meningkatnya jumlah pelaporan dan terbentuknya sistem dokumentasi yang rapi dan akuntabel. Terakhir, aplikasi ini mendorong perubahan nyata, baik dalam hal perilaku individu maupun budaya organisasi, yang mengarah pada penguatan sistem pengawasan internal serta tumbuhnya nilai-nilai antikorupsi di lingkungan instansi pemerintah. Dengan

demikian, inovasi KPK melalui pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* terbukti efektif dan berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Persepsi *stakeholder* terhadap penerapan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa secara umum, para pemangku kepentingan merespons positif keberadaan aplikasi tersebut. Penerapan aplikasi ini dianggap telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pelaporan gratifikasi, khususnya dengan memberikan kemudahan dalam pelaporan, mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pelapor. *Stakeholder*, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), merasa terbantu dengan adanya sistem pelaporan yang terstruktur, transparan, dan berbasis digital. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaporan, tetapi juga memperkuat sikap integritas ASN karena mereka merasa lebih percaya diri dalam menolak pemberian yang berpotensi gratifikasi. Selain itu, keberadaan aplikasi ini dinilai mampu mendorong budaya kerja yang lebih bertanggung jawab dan memperkecil ruang bagi praktik korupsi, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pemanfaatan aplikasi secara merata di semua instansi, serta perlunya peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara agar tidak hanya ASN yang aktif memanfaatkannya. Secara keseluruhan, aplikasi ini merupakan salah satu inovasi positif yang mendukung upaya pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas publik di Indonesia.

5.2 Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya dan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun instansi pemerintah terkait, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam pengembangan kajian keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik dan pencegahan korupsi di sektor pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.
2. Penelitian tentang inovasi pelaporan gratifikasi *online* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan atau teori yang lebih variatif, menggunakan metode yang berbeda, maupun memperluas objek penelitian pada tingkat daerah atau sektor pemerintahan yang lebih spesifik guna memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi institusi atau lembaga dengan harapan bisa bermanfaat bagi institusi atau lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan terus mengembangkan fitur dan tampilan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* agar lebih user-friendly dan inklusif, sehingga dapat menjangkau pengguna dari berbagai latar belakang pendidikan dan kemampuan teknologi.
2. Instansi pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan memberikan pelatihan rutin dan dukungan sumber daya, agar dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing.
3. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara KPK dengan instansi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menyosialisasikan aplikasi ini kepada ASN dan penyelenggaraan negara, agar budaya anti-gratifikasi dapat tertanam lebih kuat dan partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik semakin meningkat.
4. Pemerintah dapat menjadikan keberhasilan penerapan aplikasi ini sebagai model dalam mengembangkan inovasi digital lainnya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas publik secara luas, guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.